



Komite Anti Pencucian Uang dan PPATK Luncurkan Survei Nasional untuk Ukur Efektivitas Sistem Anti Pencucian Uang

B/014/HM.05/IX/2025

09 Oktober 2025

Jakarta, 9 Oktober 2025 - Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan Pilot Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT–PPSPM).

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT) di Indonesia. Kegiatan yang digelar di Jakarta ini menandai perubahan besar arah kebijakan rezim APUPPT tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif menjadi rezim yang berorientasi pada hasil nyata dan terukur.

Acara dibuka oleh Deputy Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, dan diresmikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko KumHAM Imipas), Otto Hasibuan, yang mewakili Ketua Komite TPPU.

Ukur Efektivitas, Bukan Sekadar Kepatuhan

Deputy PPATK, Fithriadi, menjelaskan bahwa pembangunan indeks ini merupakan mandat PPATK sebagai Sekretariat Komite TPPU untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memerangi kejahatan keuangan.

“Kita ingin beranjak dari budaya administratif menuju budaya efektivitas. Indeks ini menjadi alat ukur nasional untuk menilai sejauh mana kebijakan dan koordinasi kita benar-benar berdampak dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak pencucian uang serta pendanaan terorisme,” ujar Fithriadi.

Indeks ini dikembangkan secara ilmiah dan partisipatif, melibatkan regulator, aparat penegak hukum, industri pelapor, hingga kalangan akademisi.

Melalui lima dimensi pengukuran utama, indeks ini akan membantu pemerintah, mengidentifikasi capaian dan tantangan aktual di setiap sektor, mengukur efektivitas kebijakan dan koordinasi lintas lembaga, serta menyediakan dashboard kebijakan nasional berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*).

“Indonesia tidak menunggu dunia menilai, tetapi memilih melakukan penilaian diri



sendiri secara jujur dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sinergi Kelembagaan di Era Baru Komite TPPU

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menko KumHAM Imipas, Otto Hasibuan, menyampaikan apresiasi kepada PPATK atas inisiatifnya membangun instrumen pengukuran yang kredibel dan komprehensif.

“Atas nama Komite TPPU, saya mengapresiasi langkah PPATK. Indeks ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi nasional agar setiap kebijakan kita memberi dampak nyata bagi ketahanan sistem keuangan dan keadilan sosial,” ujar Otto.

Ia menambahkan, pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025, struktur Komite TPPU kini dipimpin oleh Menko KumHAM Imipas. Perubahan ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawal kebijakan nasional berbasis data dan hasil pengukuran yang kredibel.

Persiapan Menuju FATF Review 2029

Fithriadi juga menegaskan bahwa pengembangan indeks ini merupakan bagian dari strategi nasional menghadapi FATF Mutual Evaluation Review (MER) 2029.

Dalam evaluasi tersebut, Indonesia akan dinilai berdasarkan metodologi penilaian terbaru yang menekankan efektivitas hasil.

“Sebagai anggota penuh FATF, kita punya tanggung jawab global untuk memastikan sistem kita bukan hanya patuh terhadap 40 rekomendasi FATF, tapi juga efektif dalam mencapai 11 Immediate Outcomes. Indeks ini menjadi fondasi menuju ke sana,” jelasnya.

Kolaborasi Akademisi dan Profesional

Untuk memastikan objektivitas dan kualitas ilmiah, PPATK menggandeng konsorsium akademisi nasional yang dipimpin oleh Prof. Ningrum Natasya Sirait sebagai penjamin mutu.

Tim ini bekerja bersama konsultan profesional dalam merancang metodologi survei, validasi instrumen, dan analisis hasil.

“Pilot survei ini menjadi tahap awal untuk menguji metodologi sebelum diterapkan secara nasional pada 2026. Kami ingin memastikan hasilnya kredibel, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Fithriadi.



Manfaat Bagi Publik dan Sektor Keuangan

Survei ini tidak hanya bermanfaat bagi lembaga pemerintah, tetapi juga bagi industri dan masyarakat luas.

Melalui hasil pengukuran yang terbuka dan berbasis data, kebijakan publik di bidang keuangan akan menjadi lebih terarah, akuntabel, dan efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan keuangan.

“Rezim APUPPT yang kuat tidak bisa berdiri di atas satu lembaga. Ini kerja kolektif seluruh bangsa. Dengan kompas kebijakan yang jelas dan berbasis bukti, kita bisa membangun sistem keuangan yang tangguh, berintegritas, dan dipercaya dunia,” tutup Fithriadi.

Tentang Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT

Indeks ini dikembangkan PPATK sebagai instrumen nasional untuk menilai efektivitas kebijakan, koordinasi, dan implementasi lintas lembaga dalam rezim APUPPT.

Hasilnya akan menjadi dasar perumusan strategi kebijakan nasional di bawah koordinasi Komite TPPU dan bagian dari Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat tinggi madya dari berbagai kementerian/lembaga anggota Komite TPPU, perwakilan pihak pelapor, akademisi dari konsorsium penjamin mutu indeks, tim konsultan survei, dan industri keuangan.

NARAHUBUNG MEDIA

M. NATSIR KONGAH

KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI HUMAS

EMAIL : NATSIR.KONGAH@PPATK.GO.ID

TELP : 0813 8668 4827